

**PERSEPSI KONSTITUEN TERHADAP KONGRUENSI VISI
MISI HASAN BASRI AGUS-CEK ENDRA (HBA-CE)
MENJADI KEBIJAKAN PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN
DAN KESEHATAN TAHUN 2007**

**(Studi Terhadap Persepsi Konstituen Pasangan Kepala Daerah
Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi Periode 2006-2011)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh:

YUNISSA FITRIANA

BP. 04 193 058



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2008

ABSTRAK

Yunissa Fitriana, 04 193 058, Persepsi Konstituen Terhadap Kongruensi Visi Misi Hasan Basri Agus-Cek Endra Menjadi Kebijakan Pembebasan Biaya Pendidikan Dan Kesehatan Tahun 2007 (Studi Terhadap Persepsi Konstituen Pasangan Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi Periode 2006-2011), Dibimbing Oleh Pembimbing I Drs. Bakaruddin Rosyidi, MS dan Pembimbing II Andri Rusta S.IP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Juni-Juli, 2008, 124 halaman, 23 buku, 3 skripsi, 2 Koran, 12 artikel internet.

Penelitian ini melihat pandangan konstituen pasangan kepala daerah Kabupaten Sarolangun periode 2006-2011 terhadap kongruensi visi misi kepala daerah tersebut dengan kebijakan pembebasan biaya pendidikan dan berobat pada tahun 2007 yang merupakan janji politik utama pasangan tersebut pada pilkada Kabupaten Sarolangun tahun 2006. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep persepsi, konsep konstituen, konsep visi misi serta konsep kebijakan dan teori kemenjolan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan tipe deskriptif. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuisioner dan dokumentasi. Sedangkan analisa data menggunakan program SPSS 15.00 dengan analisa data menggunakan analisis frekuensi.

Dari data yang didapatkan di lapangan, diketahui bahwa hampir seluruh responden memilih pasangan tersebut berdasarkan visi misi, sehingga konstituen pasangan ini dikategorikan sebagai pemilih rasional. Konstituen juga menilai bahwa kemenangan HBA-CE dikarenakan oleh visi misi mereka. Hasil pengujian hipotesa menunjukkan bahwa sebagian besar konstituen berpendapat bahwa ada kongruensi antara visi misi dengan kebijakan pembebasan biaya pendidikan dan berobat pada tahun 2007.

Persepsi konstituen terhadap kongruensi visi misi dengan kebijakan pada bidang pendidikan dan kesehatan pada tahun 2007, dapat dilihat bahwa persepsi konstituen lebih tinggi terhadap kebijakan pembebasan biaya pendidikan daripada kebijakan pembebasan biaya berobat, sehingga kesimpulan pada penelitian ini adalah persepsi konstituen terhadap kongruensi visi misi dengan kebijakan pembebasan biaya pendidikan lebih baik daripada persepsi konstituen terhadap kongruensi visi misi dengan kebijakan pembebasan biaya berobat. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan konstituen terhadap prioritas anggaran untuk kebijakan pembebasan biaya pendidikan lebih tinggi daripada pengetahuan konstituen terhadap prioritas anggaran untuk kebijakan pembebasan biaya berobat, dari segi realisasi pun hasil yang nyata lebih terlihat pada kebijakan pembebasan biaya pendidikan dibandingkan dengan kebijakan pembebasan biaya berobat.

Kata kunci : Persepsi, Konsituen, Kongruensi Visi Misi, Kebijakan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan suatu bentuk tatanan pemerintah dalam suatu negara sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 UUD 45 yang telah diamandemen, menyebutkan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Sistem demokrasi menuntut keterlibatan masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Seperti yang dikemukakan Abraham Lincoln bahwa, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people and for the people*)¹. Karena kekuasaan merupakan alat utama dalam proses politik dan sumber kekuasaan tersebut berasal dari rakyat maka untuk mewujudkan bentuk kehidupan yang demokratis sebagai bentuk perwakilan politik masyarakat dalam pemerintahan maka perlu diperhatikan dua hal yaitu Demokrasi Perwakilan (*Representative Democracy*) dan Pemerintahan Perwakilan (*Representative Government*)², kedua hal tersebut dapat dicapai melalui pemilihan umum. Terkekangnya perwujudan demokrasi pada zaman orde baru melahirkan sebuah gerakan yang kita sebut dengan reformasi.

¹ Budiyanto, Tata Negara, Erlangga, Jakarta, 2000, hlm. 39.

² Arbi Sanit, Perwakilan Politik Di Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 25.

Keberhasilan gerakan reformasi dalam menggulingkan rezim orde baru membawa perubahan bagi kehidupan demokrasi bangsa Indonesia dan melahirkan hal-hal baru diantaranya adalah perubahan sistem politik dan pemilu. Sistem pemerintahan yang sentralistik telah bergeser menjadi sistem desentralisasi yang melahirkan konsep otonomi daerah yang sebenarnya, daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan memberdayakan daerahnya sendiri. Serta penyelenggaraan pemilihan umum sebagai wujud dari partisipasi masyarakat, yang pada zaman orde baru pemilu hanya sebagai alat untuk legitimasi kekuasaan pemerintah saja dengan cara memobilisasi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya di legislatif, dan kemudian kepala pemerintahan akan dipilih melalui MPR, hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui dengan jelas siapa yang akan jadi pemimpinnya dan apa yang akan dilakukannya untuk masyarakat. Tetapi saat ini kepala pemerintahan tidak lagi dipilih oleh MPR tetapi langsung dipilih oleh rakyat, sehingga ada pertanggungjawaban politik kepada rakyatnya melalui legislatif dan adanya penguatan fungsi dan kedudukan DPR dalam hal legislasi serta *check and balances*³. Oleh karena itulah kemudian diupayakannya pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal yaitu berupa pilkada langsung dengan disahkannya UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Seperti yang disebutkan dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan disahkannya PP Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai penjabaran

³ Budi Winarno, Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, Medis dan Sosial, 2007, Ilmf. 59.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan mengenai persepsi konstituen terhadap kognuensi visi misi HBA-CE dengan kebijakan dalam bidang pendidikan dan kesehatan pada tahun 2007, maka didapatkan kesimpulan bahwa persepsi konstituen baik dan ada perbedaan antara persepsi konstituen terhadap kognuensi visi misi dengan kebijakan pembebasan biaya pendidikan dengan persepsi konstituen terhadap kognuensi visi misi dengan kebijakan pembebasan biaya berobat di puskesmas dilihat dari pengetahuan terhadap alokasi anggaran, realisasi yaitu dalam bentuk peraturan. Konstituen juga menaruh minat serta harapan yang tinggi pada kebijakan pendidikan gratis dibandingkan pengobatan gratis dikarenakan pendidikan dipandang sangat penting bagi masyarakat dan dengan adanya pembebasan biaya pendidikan ini dapat menolong keluarga kurang mampu untuk menyekolahkan anak mereka, karena rata-rata penduduk di Kabupaten Sarolangun masih bermata pencaharian sederhana dan masih banyaknya masyarakat yang berpendidikan rendah.

Dari penelitian ini juga dapat dilihat bahwa konstituen dalam penelitian ini termasuk dalam kategori pemilih rasional, yaitu pemilih yang memilih berdasarkan visi misi pasangan calon. Visi misi mempunyai pengaruh yang besar terhadap pilihan masyarakat selain dari figur itu sendiri dan pengalamannya dalam

Daftar Pustaka

Buku-Buku Teori

- Budiyanto. 2000. *Tata Negara*. Jakarta : Erlangga.
- B.N Marbun. 2007. *Kamus Politik*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Endarmoko, Eko. 2006. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Gramedia.
- Firmanzah. 2007. *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Klingemann, Hans Dieter. 2000. *Partai, Kebijakan dan Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat. 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Putra, Fadillah. 2003. *Partai Politik Dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rosyidi, MS., Drs. Bakaruddin., 2003. *Diktat Kuliah Kebijakan Publik*. Padang : Ilmu Politik, FISIP, Unversitas Andalas.
- Salim, Peter. 2002. *The Contemporary – English – Indonesia Dictionary*. Modern Jakarta : English Pers.
- Sanit, Arbi. 1985. *Perwakilan Politik Di Indonesia*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Thoha, Miifah. 2002. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Tim SPES Jakarta. 1992. *Pemilu 1992 Harapan Dan Janji*. Jakarta : Grasindo.
- Winarno, Budi. 2007. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Jakarta : MedPress.